



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FATHUL HIMAM
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN
3. NHK : 175182

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.010.384.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 354 m²/150 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
- Tanah Seluas 2575 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 160.384.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 460 m²/56 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
- Tanah Seluas 370 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- Tanah Seluas 1110 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 256.500.000

- MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
- MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- MOBIL, HONDA BRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 115.000.000

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 281.196.490

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.663.080.490



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.663.080.490

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.